**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KONTER ANGKASA CELL MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NO. 6/PMK.03/2021**

***IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ACCOUNTING AT ANGKASA CELL COUNTERS***

***BY MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 6/PMK.03/2021***

**Muhamat Yanuar Akbar1\*, Ika Wulandari2**

Email: [muhammatyanuarakbar@gmail.com](mailto:muhammatyanuarakbar@gmail.com)

**Abstrak**

Pulsa dan kartu perdana merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Konter Angkasa Cell menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak kedua atau pendukung seperti dari buku literatur, penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai tidak dapat diterapkan pada pada Konter Angkasa Cell, karena konter bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021. Namun dalam prakteknya, konter tetap dipungut PPN walaupun bukan ditentukan sebagai PKP. Hal ini merupakan pelanggaran, namun tidak dapat diproses karena Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021 tidak menentukan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan ini. Implikasi dari penelitian ini, Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021 disarankan untuk dicabut karena memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Jika ketetapan ini ingin tetap diterapkan, maka disarankan dibuat dalam bentuk undang-undang.

Kata Kunci: Akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai, Konter

***Abstract***

*Credit and starter packs are objects of Value Added Tax (VAT). This study aims to*

*determine the application of Value Added Tax (VAT) accounting for Angkasa Cell Counters according to Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.03/2021. This type of research is qualitative research. The data used are primary data and secondary*

1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

2 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

1

*data. Primary data is obtained directly from field research, while secondary data is obtained from second parties or supporters such as from literature books, previous research, and articles related to value added tax accounting. Data analysis was performed using descriptive method. The results of the study found that accounting for value added tax cannot be applied to the Angkasa Cell Counter, because the counter is not a Taxable Entrepreneur (PKP) according to Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.03/2021. However, in practice, the counter is still collected VAT even though it is not determined as PKP. This is a violation, but cannot be processed because Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.03/2021 does not specify sanctions for parties who violate this provision.*

*Keywords: Accounting, Value Added Tax, Counter*

**PENDAHULUAN**

Pajak dibutuhkan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan

yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak (Soemarso, 2003).

Berbicara mengenai PPN merupakan bagian dari akuntansi pajak. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Kartikahadi, dkk., 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang yang dapat dipaksakanm dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Resmi, 2017).

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah

2. Fungsi mengatur

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. Misalnya penerapan pajak dengan tarif tinggi untuk minuman keras yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan cara pemungutannya a. Pajak langsung

Pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Proses pembayarannya bersifat teratur dan berkala.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, dan pajak kendaraan bermotor.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan menyetorkan dan melaporkannya ke pemerintah.

Sifat pemungutannya tidak menentu karena tergantung dari peristiwa yang membuat kewajiban untuk membayar pajak tersebut muncul.

Contohnya

PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak ekspor, bea masuk, bahan bakar, minuman keras, dan pajak rokok.

Kewajiban membayar pajak baru muncul jika terjadi transaksi jual- beli/peristiwa yang menyebabkan harus dibayarnya pajak. Jika tidak, maka kewajiban perpajakannya tidak muncul.

2. Berdasarkan sifatnya a. Pajak subjektif

Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM) yang hanya memperhatikan barang/jasa yang dikenakan pajak, tanpa melihat subjeknya.

3. Berdasarkan lembaga pemungutannya a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan bea materai.

Mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah, sedangkan PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Contoh pajak provinsi:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak kabupaten/kota:

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Berdasarkan uraian mengenai jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa PPN

termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan pemungutannya dilakukan oleh Dirjend Pajak (pajak pusat).

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP) (Resmi, 2017). Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas

transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Namun, yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan adalah pedagang/penjual.

Perusahaan yang membayar PPN adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN, membuat faktur pajak, menyetor PPN yang telah dipungutnya, dan melakukan

pelaporan PPN.

Praktek-praktek pemungutan PPN oleh perusahaan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Whaskita (2013) menemukan bahwa pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak PT. Indoprima Gemilang telah disajikan dengan jelas dan benar.

Syahputra (2018) menemukan bahwa penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan sudah didukung dengan fakta standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan, namun ada kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa penghitungan PPN yang tidak sesuai.

Syafitri (2020) yang menganalisis pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Varia Usaha Beton menemukan bahwa semua kegiatan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan ini sudah dilakukan dengan benar.

Konter Angkasa Cell merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan paket data internet atau kuota internet seperti XL, Tri, Telkomsel, Smartfren, dan Indosat Ooredoo. Konter Angkasa Cell melakukan perdagangan yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan pada Konter Angkasa Cell. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Konter Angkasa Cell tahun 2022 menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fatihudin (2014) menyatakan

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan data subyektif yang mencakup penelahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pendukung seperti dari buku literatur, penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan digunakan metode penelitian

studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan adalah cara mendapatkan data sekunder yang bersifat teoritis dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku literatur dan sumber lainnya (penelitian terdahulu) yang terkait dengan penelitian ini. Studi lapangan dilakukan dengan metode observasi dan wawancara (*interview*). Dari studi lapangan diperoleh bukti pembayaran PPN yang masih dikenakan kepada konter pasca berlakunya PMK No.

6/2021.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasi, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahaan masalah yang ada (Sugiyono,

2017).

**HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian**

Tidak setiap pengusaha merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam

hubungannya dengan PPN, hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak saja yang dapat memungut PPN. Untuk dapat menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha atau wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memenuhi persyaratan tertentu. Setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak barulah pengusaha dapat melakukan pemungutan PPN, membuat faktur pajak, menyetor PPN yang telah dipungutnya, dan melakukan pelaporan PPN.

Salah satu kewajiban pengusaha yang sudah menjadi PKP adalah membuat faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN yang berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur pajak juga sebagai bukti bahwa PKP yang memiliki faktur pajak tersebut telah menyelesaikan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN, sehingga tidak ada kemungkinan untuk memberikan tuduhan melakukan penggelapan pajak.

Dalam pembuatan faktur pajak, ada dua macam istilah yang akrab bagi PKP, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan BKP atau pemanfaatan JKP.

Dalam usaha penjualan pulsa dan kartu perdana, pajak keluaran adalah PPN yang dipungut dari penjualan pulsa dan kartu perdana. Sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh konter ketika membeli pulsa dan kartu perdana (untuk stok penjualan). Berikut contoh perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran PPN.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2022:

Pajak keluaran Rp 2.215.325

Dikurangi :

PPN atas retur penjualan 0

PPN kepada pemungut PPN 0

PPN yang disetor dimuka 0

Jumlah 0

PPN keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.215.325

Pajak masukan yang dapat diperhitungkan :

Pajak masukan yang dapat dikreditkan Rp 6.235.748

Kompensasi PPN bulan lalu 0

Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan Rp 6.235.748

Jumlah PPN lebih bayar Rp 4.020.153

Dari contoh perhitungan di atas, PKP mempunyai pajak lebih bayar sebesar Rp 4.020.153,00 jumlah ini dapat diajukan restitusi (pengembalian pajak lebih bayar) kepada Dirjend Pajak atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Peristiwa ini diketahui setelah dilakukan pengkreditan pajak.

Pengkreditan adalah upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut dengan cara pajak masukan dikurangi pajak keluaran. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat dilakukan restitusi pajak (pengembalian pajak). Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, dilakukan pembayaran pajak terutang. Restitusi pajak dapat dilakukan jika terjadi dua kondisi, yakni terjadi kelebihan pembayaran pajak dan adanya pembayaran atas pajak yang tidak seharusnya terutang.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemilik Konter Angkasa Cell belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dikarenakan Konter Angkasa Cell belum memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi PKP.

**Pembahasan**

Berdasarkan data perpajakan pada akhir tahun 2020, realisasi penerimaan

[pajak](https://www.tempo.co/tag/pajak) tercatat sebesar Rp 1.069,98 triliun. Realisasi itu hanya mencapai 89,25% dari target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1.198,82 triliun. Padahal negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkan kembali keadaan

ekonomi dan kesejahteraan rakyat akibat terdampak Covid-19. Dari data perpajakan terungkap juga bahwa kontributor terbesar dari pajak tahun 2020 adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Lebih lanjut diketahui bahwa sumber pendapatan PPN yang terbesar adalah berasal dari penjualan paket data internet (Widyastuti, 2020).

Fakta bahwa pendapatan pajak pemerintah menurun, sedangkan kontributor terbesar dari PPN adalah penjualan paket data internet, membuat pemerintah ingin mengefektifkan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dari penjualan pulsa dan kartu perdana.

Pada tanggal 22 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan

PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer (selanjutnya disebut PMK No.

6/2021). Peraturan tersebut berlaku pada tanggal 1 Februari 2022. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti hanya PPN pada pulsa dan kartu perdana saja.

Banyak pihak yang keberatan dengan peraturan itu, karena dianggap akan membebani masyarakat, disaat masyarakat sedang kesulitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menanggapi pihak-pihak yang keberatan dengan penetapan PMK No.

6/2021, Menteri Sri Mulyani menyatakan peraturan tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan pulsa, karena sebelumnya PPN penjualan pulsa dan kartu perdana juga sudah ada sehingga tidak ada penambahan jenis dan objek pajak baru. Perbedaannya, dalam ketentuan yang lama, semua tingkatan distributor pulsa dan kartu perdana kena PPN sampai ke pengecer kecil, sedangkan di dalam PMK No. 6/2021 justru dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN hanya sampai pada distributor tingkat kedua (*server*).

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang ditetapkan kena PPN pulsa dan kartu

perdana dapat dilihat dalam Pasal 4 PMK No. 6/2021.

Operator Telekomunikasi

Seluler PKP

Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama (Authorized Distributor)

PKP

Penyelenggara Distribusi

Tingkat Kedua (Server) PKP

Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya (Master Dealer)

Bukan PKP

Retailer (Konter)

Bukan PKP

Gambar 1

Bagan Para Pihak yang Menjadi PKP dalam PMK No. 6/2021

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui rantai terakhir yang menjadi PKP dalam pemungutan PPN pulsa dan kartu perdana adalah distributor tingkat kedua. Hal ini berarti distributor tingkat kedua berhak melakukan pemungutan PPN kepada distributor tingkat ketiga. Akan tetapi karena distributor tingkat ketiga bukan PKP, maka ia tidak diperbolehkan menjadi pemungut PPN terhadap distributor di bawahnya. Oleh karena itu, distributor di bawah distributor tingkat ketiga, yaitu pengecer/agen/konter sudah tidak kena pungutan PPN lagi.

Dilihat dari ketentuan yang tertuang dalam PMK No. 6/2021 dapat diketahui bahwa semua ketentuan yang dimuat sudah jelas sehingga pemungutan PPN hanya boleh dilakukan sampai pada level penyelenggara distribusi tingkat kedua (*server*) saja. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya PMK No. 6/2021 yaitu untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. Tujuan lainnya adalah

untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa dan kartu perdana (Widyastuti, 2021).

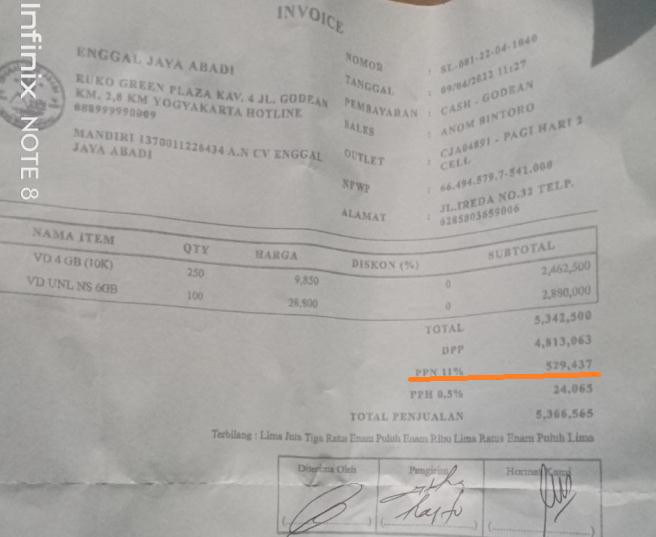
Akan tetapi dalam praktek di lapangan, pemungutan pajak PPN tetap berlangsung sampai ke tingkat pengecer/konter dan konsumen langsung. Pemungutan

PPN ke pengecer/konter dapat dilihat dari struk belanja pulsa dan kartu perdana

Konter Angkasa Cell yang masih mencantumkan PPN 11%. Padahal PMK No.

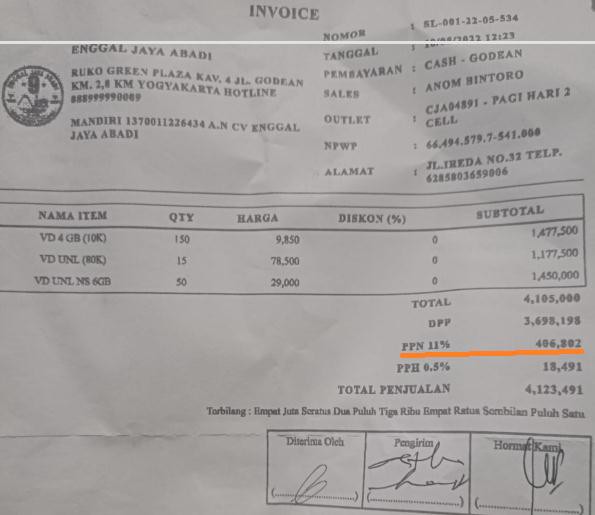
6/2021 menetapkan bahwa pengecer/konter sudah tidak dipungut PPN. Artinya terjadi pelanggaran ketentuan PMK No. 6/2021 di lapangan. Pemungutan ini memberatkan pengecer/konter. Apalagi sejak 1 April 2022 pungutan PPN naik dari

10% menjadi 11% Mengikuti kenaikan ini, maka PPN pulsa dan kartu perdana juga naik menjadi 11%.



Gambar 2

Bukti Penarikan PPN 11% Pada Bulan April 2022



Gambar 3

Bukti Penarikan PPN 11% Pada Bulan Mei 2022

Pemungutan PPN ini otomatis berlanjut kepada konsumen langsung dalam bentuk *gross-up* harga, yaitu penentuan harga yang sudah memperhitungkan ongkos pajak (Sayekti, 2021). Misalnya, paket data senilai Rp 10.000 dijual dengan harga Rp

12.000. Harga jual ini mengandung komponen modal Rp 10.000, ditambah PPN 11%

x Rp 10.000 = Rp 1.100, dan keuntungan konter Rp 900, sehingga total harga Rp

12.000.

PMK No. 6/2021 sudah menentukan bahwa hanya para distributor yang ditentukan saja yang harus membayar PPN pulsa dan kartu perdana sebesar 11%. Akan tetapi dalam kenyataannya pemungutan pajak dilakukan sampai pada level pengecer/konter. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap PMK No.

6/2021.

Dari penelusuran yang dilakukan, diketahui penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah tidak adanya ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan ini. Sebanyak 21 pasal yang dimuat dalam peraturan tersebut hanya memuat ketentuan biasa dan tidak ada satupun ketentuan yang memuat sanksi bagi pelanggar. Hal ini menyebabkan pihak pelanggar berani melakukan pelanggaran. Tidak adanya sanksi dalam PMK No. 6/2021 disebabkan Peraturan Menteri tidak boleh mencantumkan sanksi dalam ketentuannya.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pelanggaran hukum pada PMK No. 6/2021 berupa pemungutan PPN pulsa dan kartu perdana sampai ke tingkat pengecer dan konsumen langsung adalah tidak adanya sanksi hukum dalam PMK No. 6/2021. Namun sanksi ini sendiri tidak mungkin untuk dimasukkan dalam PMK No. 6/2021, karena peraturan ini hanyalah peraturan menteri

yang tidak boleh memuat sanksi hukum dalam ketentuannya. Kenyataan ini menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan PMK No. 6/2021 menjadi sulit untuk diminta pertanggungjawaban dari pihak pelanggar.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dapat diterapkan pada pada Konter Angkasa Cell, karena konter ini bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021 tentang tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, pihak-pihak yang menjadi wajib pajak PPN hanya dibatasi beberapa pihak, yaitu: Operator telekomunikasi seluler, penyelenggara distribusi tingkat pertama (*authorized distributor*), penyelenggara distribusi tingkat kedua (*server*), dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya (*main dealer*). Dalam hal ini penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya yaitu distributor tingkat ketiga merupakan pihak terakhir yang dipungut PPN dan tidak berhak memungut PPN pada penyelenggara distribusi tingkat bawahnya seperti pengecer/agen/konter. Namun dalam prakteknya, setelah peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2022, konter tetap dipungut PPN sehingga hal ini merugikan konter dan juga konsumen langsung yang akhirnya harus memikul beban PPN padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021 sudah ditentukan bahwa mereka tidak dibebani PPN.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fatihudin, D. (2014). Urgensitas peran otoritas jasa keuangan (OJK): Implementasinya dalam ‘pasar’ industri keuangan dan perti ekonomi. *Equilibrium*, *12* (2), 167 – 171.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba

Empat.

Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan pendekatan komperhensif*. Jakarta: Salemba

Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Syafitri, N.A. (2020). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.

Varia Usaha Beton. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Muhammadiyah

Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Syahputra, M.W. (2018). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan daerah (PD) Pembangunan Kota Medan. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Whaskita, S. (2013). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.

Indoprima Gemilang. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Wijaya Putra

Surabaya: Fakultas Ekonomi.

Widyastuti, A.Y. (2020). Penerimaan pajak capai Rp 1.069,98 triliun atau 89,25 persen dari target”. Diakses dari [https://bisnis.tempo.co/-read/1440165/2020- penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target](https://bisnis.tempo.co/-read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target) pada tanggal 10 November 2022.

. (2021). Pajak pulsa diterapkan per 1 Februari, bagaimana dampak ke operator seluler?”. Diakses dari [https://bisnis.tempo.co/read/1427964/pajak-pulsa-diterapkan-per-1-februari- bagaimana-dampak-ke-operator-seluler?page\_-num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1427964/pajak-pulsa-diterapkan-per-1-februari-bagaimana-dampak-ke-operator-seluler?page_num=2) pada tanggal 10

November 2022.